

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro dalam Pengembangan Destinasi Wisata Padangan Heritage, dapat disimpulkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan merupakan faktor penting dalam mendukung keberlanjutan pengembangan destinasi wisata berbasis sejarah dan budaya. Pengembangan Padangan Heritage tidak hanya membutuhkan dukungan pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan kapasitas kelembagaan yang mampu merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh proses pengembangan destinasi secara terarah dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro dalam pengembangan Padangan Heritage telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari telah tersedianya struktur organisasi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kebudayaan dan pariwisata, adanya kepemimpinan dan arahan dalam pengembangan destinasi, keterlibatan masyarakat lokal dalam memberikan informasi sejarah, tersedianya beberapa sarana dasar, serta adanya perencanaan pengembangan fasilitas dan promosi.

Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, yaitu koordinasi dan kolaborasi antaraktor, pengembangan SDM yang memiliki kompetensi khusus

dalam wisata heritage dan pemasaran digital, peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan SOP dan sistem pengelolaan, serta peningkatan budaya organisasi yang mendukung inovasi dan kolaborasi.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan kapasitas internal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tetapi juga perlu dilakukan melalui penguatan jejaring kelembagaan dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pengembangan Padangan Heritage membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, pengelola, Pokdarwis, masyarakat lokal, komunitas sejarah, pelaku UMKM, akademisi, sektor swasta, dan media.

Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Padangan Heritage sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya yang berkelanjutan. Pengembangan destinasi harus dilakukan dengan prinsip keseimbangan antara pelestarian warisan budaya, peningkatan daya tarik wisata, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan pemanfaatan teknologi digital.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pengelola

Padangan Heritage, masyarakat, serta pihak-pihak terkait dalam pengembangan destinasi wisata Padangan Heritage.

1. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro disarankan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh dengan memperkuat enam aspek utama, yaitu struktur organisasi, kepemimpinan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem dan prosedur kerja, serta budaya organisasi.

Dalam aspek struktur organisasi, dinas perlu memperjelas pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah daerah, pengelola, Pokdarwis, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pembagian peran tersebut penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dan memastikan setiap pihak memiliki tanggung jawab yang jelas.

Dinas juga disarankan membangun forum koordinasi atau mekanisme komunikasi rutin yang mempertemukan berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan Padangan Heritage. Forum tersebut dapat digunakan untuk membahas perencanaan, pelaksanaan program, permasalahan, evaluasi, serta pengembangan inovasi destinasi.

2. Penguatan Kolaborasi Kelembagaan

Pengembangan Padangan Heritage sebaiknya tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pemerintah daerah perlu membangun model kolaborasi yang lebih luas dengan pemerintah kecamatan, pemerintah

desa/kelurahan, Pokdarwis, masyarakat lokal, komunitas sejarah, pelaku UMKM, akademisi, sektor swasta, dan media.

Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan forum atau tim pengembangan Padangan Heritage yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Forum tersebut dapat menjadi wadah koordinasi dalam menyusun program, mengembangkan atraksi wisata, melakukan promosi, melestarikan bangunan heritage, serta memberdayakan masyarakat.

3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disarankan untuk meningkatkan kompetensi SDM yang terlibat dalam pengembangan Padangan Heritage. Pelatihan perlu dilakukan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan destinasi wisata heritage.

Materi pelatihan dapat mencakup:

- a. Pengelolaan destinasi wisata heritage.
- b. Pemanduan wisata.
- c. Storytelling sejarah
- d. Interpretasi warisan budaya
- e. Pelayanan wisatawan
- f. Digital marketing
- g. Pengelolaan media sosial

- h. Fotografi dan videografi
- i. Pengembangan paket wisata
- j. Pengelolaan UMKM dan ekonomi kreatif.

Masyarakat lokal yang memiliki pengetahuan sejarah perlu dilibatkan secara aktif sebagai bagian dari SDM pengelola destinasi. Pengetahuan lokal tersebut perlu didokumentasikan agar tidak hilang dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

4. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu meningkatkan sarana dan prasarana pendukung Padangan Heritage secara bertahap dengan tetap memperhatikan prinsip pelestarian cagar budaya.

Fasilitas yang perlu diprioritaskan antara lain pusat informasi, papan interpretasi sejarah, papan petunjuk, fasilitas parkir, toilet yang ramah bagi penyandang disabilitas dan lansia, tempat istirahat, fasilitas keamanan, serta fasilitas pendukung lainnya.

Pembangunan fasilitas harus dilakukan melalui kajian yang mempertimbangkan nilai sejarah dan arsitektur bangunan. Setiap intervensi fisik terhadap bangunan heritage harus mengutamakan pelestarian keaslian dan karakter bangunan.

5. Penguatan Sistem dan SOP Pengelolaan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama pengelola Padangan Heritage perlu menyusun SOP pengelolaan destinasi yang jelas dan mudah diterapkan. SOP

tersebut dapat mencakup mekanisme penerimaan pengunjung, pelayanan wisatawan, pemanduan, pemeliharaan bangunan, kebersihan, keamanan, pengelolaan kegiatan, promosi, serta penanganan keadaan darurat.

Selain itu, perlu dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Evaluasi dapat menggunakan indikator seperti jumlah kunjungan, kepuasan wisatawan, kondisi sarana prasarana, efektivitas promosi, keterlibatan masyarakat, dan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

6. Penguatan Promosi dan Digitalisasi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disarankan untuk meningkatkan promosi Padangan Heritage melalui media digital. Strategi promosi dapat dilakukan melalui media sosial, website resmi pemerintah daerah, platform pariwisata, video dokumenter, konten sejarah, dan kolaborasi dengan komunitas kreatif.

konten promosi sebaiknya tidak hanya menampilkan bangunan, tetapi juga menceritakan sejarah Padangan Heritage secara menarik dan mudah dipahami. Penggunaan storytelling digital dapat meningkatkan daya tarik destinasi sekaligus memperkenalkan sejarah lokal kepada masyarakat luas.

Selain itu, pengembangan promosi dapat dikombinasikan dengan konsep walking tour yang menghubungkan Padangan Heritage dengan titik-titik bersejarah lainnya di kawasan Padangan. Dengan demikian, Padangan Heritage tidak berdiri sebagai objek wisata tunggal, tetapi menjadi bagian dari kawasan wisata sejarah Padangan.

7. Pengembangan Paket Wisata Heritage

Padangan Heritage perlu dikembangkan menjadi bagian dari paket wisata sejarah dan budaya. Paket wisata dapat menggabungkan kunjungan ke bangunan heritage dengan kegiatan walking tour, wisata kuliner lokal, kunjungan UMKM, kegiatan budaya, dan pengenalan sejarah kawasan Padangan.

Pengembangan paket wisata dapat meningkatkan lama kunjungan wisatawan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat sekitar.

8. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal perlu ditempatkan sebagai aktor utama dalam pengembangan Padangan Heritage. Pemerintah daerah dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan wisata, penyediaan jasa pemandu, pengembangan kuliner lokal, UMKM, ekonomi kreatif, kegiatan budaya, dan penyediaan produk wisata.

Pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menciptakan manfaat ekonomi langsung dan meningkatkan rasa memiliki terhadap Padangan Heritage. Dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat, upaya pelestarian bangunan dan sejarah lokal juga diharapkan menjadi lebih kuat.

9. Bagi Pengelola dan Pokdarwis

Pengelola dan Pokdarwis disarankan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan destinasi melalui pembagian tugas yang jelas, peningkatan pelayanan kepada

wisatawan, dokumentasi sejarah, serta pengembangan kegiatan wisata yang inovatif.

Pengelola juga perlu membangun komunikasi yang intensif dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta masyarakat sekitar. Setiap permasalahan yang muncul di lapangan perlu segera dikomunikasikan agar dapat ditindaklanjuti secara bersama.

10. Bagi Masyarakat

Masyarakat sekitar diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian Padangan Heritage. Masyarakat juga dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari kegiatan pariwisata dengan tetap menjaga nilai budaya dan karakter kawasan.

Masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai sejarah Padangan diharapkan dapat ikut berperan dalam mendokumentasikan dan menyebarkan cerita sejarah lokal secara bertanggung jawab.

11. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji pengembangan Padangan Heritage dengan pendekatan yang lebih luas. Penelitian dapat difokuskan pada efektivitas kolaborasi antaraktor, tingkat kepuasan wisatawan, dampak ekonomi pengembangan destinasi terhadap masyarakat, strategi digital marketing, atau model pengembangan kawasan wisata heritage.

Penelitian selanjutnya juga dapat melakukan observasi lapangan secara lebih mendalam untuk memverifikasi kondisi sarana dan prasarana yang tercatat dalam sistem SISPARnas dengan kondisi aktual di lapangan. Selain itu, penelitian berikutnya dapat melibatkan lebih banyak informan, termasuk wisatawan, masyarakat lokal, pelaku UMKM, komunitas sejarah, Pokdarwis, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., Shepherd, R., & Wanhill, S. (1993). *Tourism: Principles and Practice*. London: Longman.

Eade, D. (2007). *Capacity Building: An Approach to People-Centered Development*. Oxfam.

Grindle, M. S. (1997). *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries*. Cambridge: Harvard Institute for International Development.

Horton, D., Alexaki, A., Bennett-Lartey, S., Brice, K. N., Campilan, D., Carden, F., de Souza Silva, J., Duong, L. T., Khadar, I., Boza, A. M., & Watts, J. (2003). *Evaluating Capacity Development: Experiences from Research and Development Organizations Around the World*. The Hague: International Service for National Agricultural Research (ISNAR).

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pitana, I. G., & Diarta, I. K. S. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.

Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gava Media.

United Nations Development Programme (UNDP). (2009). *Capacity Development: A UNDP Primer*. New York: United Nations Development Programme.

Grindle, M. S. (Ed.). (1997). *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries*. Boston: Harvard Institute for International Development.

Horton, D., Alexaki, A., Bennett-Lartey, S., Brice, K. N., Campilan, D., Carden, F., de Souza Silva, J., Dupleich, L., Khadar, I., Maestrey Boza, A., Mayne, K., Perez, J., & Vernoooy, R. (2003). *Evaluating Capacity Development: Experiences from Research and Development Organizations Around the World*. Ottawa: International Development Research Centre (IDRC).

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

JURNAL

Fahirah, Q. N., & Alrianingrum, S. (2025). Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro dalam Pengembangan Desa Wisata Geoheritage Wonocolo Tahun 2016–2020. *Jurnal Avatara*.

Rahmasari, D. A. P., Taufiq, A., & Junadi. (2025). Reinventing Government Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro dalam Pengembangan Pariwisata. *Reslaj Journal*.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2020). *Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan*

Kepariwisata Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019–2025. Bojonegoro: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2021). *Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro*. Bojonegoro: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2023). *Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/1/KEP/412.11/2023 tentang Penetapan Rumah Tua Padangan Eks Rumah Haji Ali Rasyad (Padangan Heritage) sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten*. Bojonegoro: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

SUMBER RESMI DAN WESBITE PEMERINTAH

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. (2026). *Portal Resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro*. Bojonegoro: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2026). *Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro*. Bojonegoro: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Sistem Informasi Pariwisata Nasional (SISPARnas). (2026). *Data Destinasi Wisata Padangan Heritage, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro*. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Bojonegoro.
(2026). *Dokumen Peraturan dan Produk Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro*. Bojonegoro: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Bojonegoro History. (2026). *Informasi dan Dokumentasi Sejarah Kawasan Padangan dan Pengembangan Wisata Heritage*. Bojonegoro.